

Liberalisme Dalam Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi

Imanuddin Abil Fida

Dosen STAI Muhammadiyah Probolinggo

Abstract

This article departs from the fact that the law in Indonesia is buried. Although the education is not the main factor which is caused to the bad of law, but the Islam education is play a significant role for the law. It is because Islamic education is 'the main school' for law enforcer. In term of law, the knowledge of morality, justice, liberty and truth must be the most important subject in order to product law enforcer with their morality. In fact, those values is abused. Therefore, Islamic education as one of the main subject in universities have to play an important role with the good construction of knowledge. It is because Islamic education will shape the worldview of students in their live. When their worldview is problematic, we can not expect litigious society. This article reveals that the concept of Islamic education which is based on al-Qur'an and the Sunnah has close link with law. It is unfortunate if the concept of Islamic education which is taught in universities was wrong so as produce people who do not care laws.

Key words: *Liberalisme, Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi*

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam senantiasa memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh realitas sosio-kultural yang mengitarinya. Ia mempengaruhi masyarakat dalam membentuk pola pikir, arah pandang serta motivasi hidup bagi sekitarnya. Di samping itu ia juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang dinamis dan terus-menerus. Kedua kutub inilah yang menjadi talik ulur pendidikan Islam sehingga segala perkembangan dan perubahan tidak akan lepas dari perubahan social dan melahirkan gerak dinamis pendidikan Islam. Tentunya, pendidikan Islam yang dinamis tersebut haruslah mengarah kepada perbaikan dan penyempurnaan. Dari situ, diharapkan pendidikan Islam mampu memainkan peran penting untuk

menjadi alat perubahan (*tool of change*) dalam memperbaiki kondisi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai proses dalam membentuk akhlak mulia, mengembangkan nilai-nilai manusiawi, persuasif dan halus (Al Abrasy, 1979:436). Hasan Langgulong juga menegaskan bahwa prinsip dasar pendidikan adalah kesetiakawanan yang dibangun di tengah-tengah masyarakat (Langgulong, 1988:137-145). Maka bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan utama membentuk manusia yang mempunyai kualitas tinggi secara individual (kesalehan individual) disamping itu juga mempunyai kualitas yang tinggi secara impersonal (kesalehan sosial).

Maka pada prosesnya, pendidikan Islam haruslah memuat tentang nilai-nilai ketuhanan yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Keterkaitan pendidikan dengan Tuhan ini harus diaplikasikan dalam semua sisi pendidikan, mulai dari kurikulum, proses, penilaian sampai pada sistem pengajaran. Sehingga esensi pendidikan Islam tidak hanya memberikan pelajaran lalu memberikan nilai terhadap hasil ujian, namun harus menyeluruh pada pembinaan jasmani dan rohani. Hal ini sejalan dengan definisi pendidikan Islam yang diungkapkan oleh Ahmad D. Marimba (1974:26) bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum dan ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian Islam.

Namun, idealisme pendidikan Islam yang seharusnya dibangun terutama di tingkat perguruan tinggi ternodai oleh maraknya ajaran-ajaran yang menyetepikan peran Tuhan. Pada gilirannya, nilai-nilai moral seperti sopan santun, keadilan, keramahan dan gotong royong juga ikut terkikis dengan makin menjamurnya ajaran yang menuntun mahasiswa untuk liberal, kapitalis dan sekuler. Jika mulai akhir tahun 70-an sampai 90-an ajaran tersebut masih menjadi pemikiran segelintir akademisi, namun pada dekade ini semakin menjadi-jadi. Bahkan, ajaran itu dipraktekkan oleh kalangan mahasiswa dan terpelajar dalam kehidupan sehari-hari.

Imbas dari makin maraknya liberalisasi dan sekulerisasi tersebut adalah berubahnya arah pandangan hidup sebagian besar masyarakat kita. Dari dahulu yang begitu religius, sekarang berubah menjadi lebih bebas dan menggunakan agama hanya sebagai simbol saja atau kendaraan untuk mencapai kesejahteraan dunia. Dunia hukum juga tidak luput dari pengaruh tersebut. Tengoklah begitu banyak penegak hukum kita yang mayoritas beragama Islam dan setidaknya mengenyam pendidikan Islam semasa belajar tidak lagi mengindahkan hukum itu sendiri. Bahkan, banyak yang sudah terlewat batas dengan mengabaikan nilai hukum (*disregarding the law*) atau bahkan tidak menghormatinya (*disrespecting the law*).

B. Hakikat Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi

Banyak pakar pendidikan mencoba untuk memberikan makna pendidikan sesuai dengan pemahaman mereka. John Dewey (1958:62) misalnya, mengartikan pendidikan sebagai metode yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. (*Education is the fundamental method of social progress and reform*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sedangkan makna pendidikan dalam Islam pada umumnya menggunakan istilah *al-tarbiyah* sebagai istilah yang paling populer dalam masyarakat. Istilah tersebut digunakan pada zaman kontemporer ini dan selalu menjadi rujukan bagi ahli pendidikan termasuk di Indonesia. Adapula istilah *al-ta'dib*, dan *al-ta'lim* yang sudah digunakan pada masa-masa awal kedatangan Islam lebih jarang diungkapkan walaupun pada hakikatnya mempunyai cakupan yang lebih luas.

Adalah Syed Naquib al-Attas (1979:36), seorang ilmuwan Malaysia kelahiran Bogor, yang menawarkan istilah *al-ta'dib* sebagai makna pendidikan. Menurutnya, "Adab adalah aplikasi dari nilai keadilan yang direfleksikan oleh kebijaksanaan, pengakuan terhadap adanya tingkatan (*marātib*) dalam diri manusia dan eksistensi ilmu pengetahuan dan kesesuaian sikap terhadap pengakuan tersebut. Maka itulah, pendidikan adalah menanamkan adab dalam diri manusia" (*Adabis "the spectacle (mashhad) of justice as it is reflected by wisdom; and it is the acknowledgement of the various hierarchies (marātib) in the order of being and existence and knowledge, and concomitant action in accord with the acknowledgement and recognition. Therefore, education is the instilling and inculcation of adab in human being it is ta'dib (Education).*

Proses pendidikan yang diungkap dari makna pendidikan di atas berlangsung di semua usia dan tempat. Namun demikian, pendidikan di tingkat perguruan tinggi memegang peranan penting dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi berperang sebagai *centre of excellent* yang akan menghasilkan lulusan yang siap berkarya dalam masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing. Perguruan tinggi merupakan pelopor pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan terwujudnya individu yang bermanfaat dengan akhlak yang baik.

Peran perguruan tinggi yang sangat signifikan tersebut haruslah diikuti dengan muatan materi kuliah yang bermutu disertai proses dan sistem yang baik, utamanya materi pendidikan agama Islam. Dalam PP No. 30 tahun 1990 pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Mengacu pada fakta di atas, jelaslah bahwa kedudukan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi menempati posisi yang penting.

Dalam perkembangannya, pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan dan profesional yang beriman

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Dari tujuan tersebut jelaslah bahwa pendidikan agama Islam menjadi salah satu materi andalan sebagai benteng pertahanan masyarakat dari gerakan liberalisasi. Selain itu, eksistensi pendidikan agama Islam harus memenuhi harapan masyarakat untuk mengembangkan potensi generasi muda yang berakhlak mulia.

Sesuai PP tersebut di atas, maka Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi harus menyajikan pokok-pokok ajaran agama Islam dengan materi-materi ajar antara lain:

1. Konsep Ketuhanan, alam, dan manusia
2. Sumber-sumber kebenaran
3. Sumber-sumber ajaran Islam
4. Akidah
5. Syariah
6. Khilafah
7. Akhlak
8. Akhlak dalam bidang ekonomi
9. Islam, Pengetahuan, dan teknologi
10. Keadilan, kepemimpinan, dan kerukunan

Kesepuluh poin tersebut sebenarnya sudah sangat cukup untuk mencakup beberapa inti pengajaran Islam. Walaupun hal itu masih menyisakan problem diantaranya beban SKS yang terlalu minim, namun cakupan materi diatas patut diapresiasi. Sebab, kesemua poin tersebut memuat hampir semua ruang lingkup pendidikan Islam. Hal itu sejalan dengan pendapat Zakiah Daradjad yang menyimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam tidak hanya terpaku pada sisi akidah (keyakinan), ibadah (ritual), dan akhlak (etika) saja, namun juga mencakup semua hal kehidupan manusia (Daradjad, 1994:35).

Dari uraian di atas, menurut Moh. Roqib, maka pendidikan Islam, terutama di perguruan tinggi haruslah mencakup setidaknya empat aspek penting dalam kehidupan yang meliputi:

1. Semua proses perubahan menuju ke arah perbaikan dan perkembangan berdasarkan nilai dan ajaran agama Islam
2. Keterkaitan antara pendidikan jasmani, akal, mental, perasaan dan rohani
3. Keseimbangan antara jasmani-rohani, keimanan-ketakwaan, pikir-dzikir, ilmiah-amaliah, materiil-spirituil, individual-sosial dan dunia-akhirat
4. Realisasi dua fungsi penting manusia yaitu fungsi sebagai hamba Allah yang berserah diri hanya kepada-Nya dan khalifah Allah yang diberi mandat untuk memelihara, memanfaatkan dan melestarikan alam semesta (Roqib, tt:22).

C. Paham Liberalisme dan Prinsipnya

Liberalisme adalah sebuah paham yang timbul dan mulanya berkembang di dunia Barat. Julio Teehankee, seorang pemikir liberal yang berasal dari Filipina, menyatakan bahwa terdapat enam prinsip dasar dalam tradisi berpikir liberal, yaitu:

1. Individualisme; Inilah prinsip utama kaum liberal yang selalu diagung-agungkan. Menurut paham ini, individu adalah pusat segalanya. Maka, setiap orang harus memahami hak-hak individu dan tidak mudah menyalahkan atau menghukum. Sebab, setiap orang mempunyai landasan dan pemikiran yang berbeda-beda. Keberhasilan atau kegagalan seorang pun juga berangkat dari individu itu sendiri. Keberhasilan disebabkan karena ia mampu dan bekerja keras, sebaliknya, kegagalan karena ia malas ataupun tidak mampu. Maka seluruh kebijakan paham liberal diarahkan untuk memberikan kebebasan bagi hak-hak individu dalam masyarakat.

2. Rasionalisme; Setiap sesuatu pastilah bisa dipahami secara logis. Jika sesuatu tidak bisa dinalar dengan akal, maka ia bukan bagian dari kehidupan dan keyakinan dan harus diabaikan. Demikianlah kaum liberal meyakini pemikiran tersebut. Mereka percaya bahwa semuanya yang ada di dunia ini harus bisa dirasionalkan. Maka tak heran apabila kaum liberal mengabaikan keyakinan agama yang dianggapnya tidak rasional.
3. Kebebasan; Prinsip ini menjadi salah satu inti dari pemikiran liberal. Kata liberal pun diartikan secara harfiah sebagai kebebasan. Menurut kaum liberal, kebebasan sudah selayaknya diberikan kepada setiap individu yang punya peran penting seperti diungkap pada prinsip pertama tadi. Tanpa kebebasan, maka dunia tidak akan dinamis dan tidak siap terhadap perubahan. Karena perubahan adalah sebuah kepastian, maka kebebasan juga harus menjadi sebuah slogan agung untuk menyikapi perubahan itu. Kebebasan individu tersebut adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati (*conscience*) setiap manusia sehingga seluruh filosofi liberalisme berangkat dari kebebasan manusia.
4. Tanggung jawab; Kaum liberal percaya bahwa kebebasan yang dibangun harus bisa dipertanggung jawabkan. Walaupun prinsip ini ada dalam kamus mereka, namun sangat jarang diungkapkan. Yang terjadi adalah kaum liberal berusaha untuk meruntuhkan semua 'kemampuan berpikir' yang selama ini dibangun seperti ketaatan kepada agama.
5. Keadilan; Salah satu prinsip yang juga dibangun adalah keadilan bagi semua orang. Kaum liberal meyakini karena individu punya kebebasan, maka setiap individu juga harus adil dalam menyikapi individu lain.
6. Toleransi; Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu

belum tentu disetujuinya. Toleransi adalah dasar bagi kebersamaan dan kerukunan hidup. Tanpa toleransi, kebebasan tidak dapat ditegakkan.

Jika dicermati lebih jauh, ada 4 prinsip yang sering digaungkan oleh kaum liberal, yaitu individualisme, rasionalisme, kebebasan dan toleransi. Keempatnya merupakan inti dari pembahasan liberal yang menghasilkan paham realivisme dan sekulerisme. Paham relativisme merupakan pemikiran yang meyakini bahwa kebenaran itu relatif. Hal ini karena setiap individu bebas untuk berpikir dan berpendapat. Pun, pemikiran itu harus rasional dan harus pula dihormati oleh orang lain. Jadilah semua pemikiran individu bisa jadi benar dan salah. Konstruksi paham relativisme sekilas memang menawarkan metodologi yang jelas. Namun pada hakikatnya, paham tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat. Apabila individu bebas untuk berpikir, maka mereka juga bebas untuk berpikir jahat dan buruk. Bebas pula untuk bertindak sewenang-wenang tanpa batas dan rambu-rambu yang jelas. Mengapa ini bisa terjadi? Karena prinsip relativisme tidak mengenal kebenaran yang mutlak. Kenisbian kebenaran itulah yang menjadi masalah utama dari relativisme ini.

Paham relativisme itu tidak sendirian. Ia didukung oleh paham sekulerisme yang meyakini bahwa agama tidak boleh mencampuri urusan publik. Adalah Harvey Cox yang 'mendewakan' ajaran sekulerisme tersebut. Usaha untuk mendukung paham sekulerisme adalah sekularisasi yang merupakan pembebasan manusia dari ajaran agama dan metafisika. Sekulerisasi juga mengalihkan pandangan manusia dari 'dunia lain' (agama dan seperangkat ajaran dogmatis lainnya) menuju 'dunia kini' yang lebih rasional, empirik dan kontemporer. Maka menurut Cox (1967:15), semua umat beragama seharusnya mendukung proses sekulerisasi ini karena ia merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan agama itu sendiri.

Arus liberalisme tersebut merambah banyak sisi kehidupan; sosial, ekonomi, politik, pendidikan bahkan pemikiran agama. Salah satu sisi

yang terkena imbasnya adalah pendidikan Islam di perguruan tinggi. Penyebaran paham "pluralisme agama", "dekonstruksi agama", "dekonstruksi kitab suci", dan sebagainya kini justru berpusat di kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia. Paham yang lahir dari pemikiran liberal dan sekuler tersebut masuk dan sekarang dianut bukan saja oleh mahasiswa, namun juga oleh banyak dosen Islam yang mengajar di perguruan tinggi Islam sehingga paham tersebut seakan-akan merobohkan Islam dari pondasinya yang paling utama.

D. Pengaruh Liberalisme Bagi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi

Jika kita teliti lagi mengenai sejarah pendirian Perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kita akan mendapatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia, melalui menteri agama, menginisiasi pendirian perguruan tinggi Islam dengan berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pendirian tersebut digulirkan melalui Peraturan Presiden No. 11/1960. Pada tahun 1968, menteri agama KH. M. Dachlan, yang juga tokoh di kalangan Nahdatul Ulama (NU), menyampaikan pentingnya eksistensi kampus-kampus seperti IAIN. Dalam pidatonya ia merefleksikan betapa urgennya pendidikan Islam, sehingga umat Islam Indonesia sejak jaman penjajah pun sudah kompak menolak pendidikan yang diberikan oleh kaum penjajah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan norma keindonesiaan.

Namun pada perkembangannya, perguruan tinggi Islam berubah haluan. Paham liberalisme yang tumbuh subur di dunia Barat mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 70-an. Adalah Harun Nasution dianggap sebagai pelopor liberalisasi Islam di kampus-kampus Islam. Ketika menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia memulai untuk melakukan perubahan yang serius dan sistematis dalam studi Islam dengan mengubah beberapa kurikulum yang ada di dalamnya. Perubahan tersebut diapresiasi oleh banyak kalangan ketika itu. Maka pada bulan Agustus

tahun 1973, rektor IAIN seluruh Indonesia mengadakan rapat di Ciambuluit Bandung. Rapat tersebut memutuskan untuk menggunakan buku karya Harun Nasution sebagai buku wajib rujukan mata kuliah Pengantar Agama Islam. Buku yang bertajuk *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* tersebut sangat kontroversial karena memuat pemikiran liberal dan sekuler. Walaupun tidak semua rektor menyetujui penggunaan buku tersebut, namun Departemen Agama RI tetap menyetujui hasil rapat tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Desember 1975, Prof. HM Rasjidi, Menteri Agama RI yang pertama, menulis laporan rahasia kepada Menteri Agama dan beberapa eselon tertinggi di Depag melalui bukunya. Dalam buku yang berjudul, *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang 'Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya'*, Rasjidi menceritakan isi suratnya: "Laporan Rahasia tersebut berisi kritik terhadap buku Sdr. Harun Nasution yang berjudul *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Saya menjelaskan kritik saya fasal demi fasal dan menunjukkan bahwa gambaran Dr. Harun tentang Islam itu sangat berbahaya, dan saya mengharapkan agar Kementerian Agama mengambil tindakan terhadap buku tersebut, yang oleh Kementerian Agama dan Direktorat Perguruan Tinggi dijadikan sebagai buku wajib di seluruh IAIN di Indonesia" (Rasjidi, 1977:13).

Nasihat Rasjidi dalam buku yang terbit tahun 1977 tersebut memang sangat penting untuk direnungkan, karena begitu jelasnya kesalahan Harun Nasution dalam bukunya tersebut, baik kesalahan ilmiah maupun ditinjau dari kebenaran Islam. Salah satu contoh kesalahan fatal itu seperti berikut. Harun menempatkan Islam sebagai agama yang mempunyai posisi sama dengan agama-agama lain. Ia meyakini bahwa Islam juga merupakan agama yang berevolusi dan berubah dari zaman ke zaman sesuai dengan realitas sosio-kultural masyarakat yang mengitarinya (*evolving religion*). Ia juga menyamakan Islam seperti agama lain yang tidak lepas dari sejarah dan budaya yang ia sebut sebagai agama sejarah dan agama budaya (*historical and cultural religion*).

Harun juga meyakini bahwa Islam bukanlah satu-satunya agama tauhid. Menurutnya, ada empat agama yang juga merupakan agama tauhid, yaitu Islam, Yahudi, Kristen dan Hindu. Harun menambahkan bahwa kemurnian tauhid hanya dipelihara oleh Islam dan Yahudi. Ketiga agama yang pertama, yaitu Islam, Yahudi dan Kristen merupakan agama satu rumpun yang berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Ibrahim as. Berangkat dari fakta sejarah tersebut, ia menyamakan semua agama tersebut sebagai satu kesatuan dalam realitas sejarah dan sosio-kultural (Nasution, 1986:15-22).

Kesimpulan yang mengatakan bahwa Yahudi saat ini sebagai agama tauhid murni, seperti halnya agama Islam, adalah kesimpulan yang tidak berdasar pada fakta sejarah dan sosial. Di sinilah paradoks Harun berada. Ia mengakui bahwa Yahudi adalah agama satu rumpun dengan Islam yang mempunyai ajaran tauhid yang sama berdasarkan sejarah. Namun, ia juga mengabaikan sisi sejarah bahwa Allah sudah menghapus agama lain selain Islam berdasarkan dalil al-Qur'an. Selain itu, fakta sejarah mengatakan bahwa ajaran Yahudi yang ada saat ini sudah mengingkari ajaran Taurat yang diturunkan Allah melalui Nabi Musa. Fakta itulah yang diabaikan oleh Harun sehingga kesimpulan yang ia berikan jelas mengada-ada. Kesimpulan tersebut juga sangat berbahaya karena bisa meruntuhkan bangunan keimanan seseorang terhadap agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

Proses masuknya paham liberalisme juga diungkapkan oleh Adian Husaini. Ia menegaskan bahwa telah terjadi sebuah proses liberalisasi yang sistematis di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut diakui sendiri oleh para pelaku dan pengambil kebijakan dalam Pendidikan Islam di berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut jelas terlihat dari terbitnya sebuah buku yang berjudul: *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2002). Buku tersebut diterbitkan atas kerjasama Canadian International Development Agency

(CIDA) dan Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam (Ditbinperta) Departemen Agama.

Adian juga menyitir salah satu ungkapan dalam buku tersebut yang menceritakan sejarah perubahan kampus IAIN dari lembaga dakwah menjadi lembaga akademis: *"Sebagai lembaga berafiliasi kepada agama, IAIN mulanya dimaknai sebagai lembaga dakwah Islam yang bertanggung jawab terhadap syiar agama di masyarakat. Sehingga orientasi kepentingannya lebih difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan dakwah. Tentu saja orientasi ini tidaklah keliru. Hanya saja, menjadikan IAIN sebagai lembaga dakwah pada dasarnya telah mengurangi peran yang semestinya lebih ditonjolkan, yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena IAIN sebagai lembaga akademis, maka tuntutan tanggung jawab yang dipikul oleh IAIN adalah tanggung jawab akademis ilmiah."*

Masuknya paham liberalisme itu jelas mempengaruhi cara berpikir hampir semua elemen yang ada di perguruan tinggi Islam. Dari sekian banyak pemahaman yang keliru dan mengelirukan, ada satu pemahaman yang diungkap oleh Khamami Zada (2001) dalam bukunya. Ia menulis: *"Filosofi pendidikan Islam yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain mesti mendapat kritik untuk selanjutnya dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim-nonmuslim, dan baik-benar (truth claim), yang sangat berpengaruh terhadap carapandang Islam terhadap agama lain mesti dibongkar agar umat Islam tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan tidak ada jalan keselamatan. Jika cara pandangnya bersifat eksklusif dan intoleran, maka teologi yang diterima adalah teologi eksklusif dan intoleran, yang pada gilirannya akan merusak harmonisasi agama-agama, dan sikap tidak menghargai kebenaran agama lain. Kegagalan dalam mengembangkan semangat toleransi dan pluralisme agama dalam pendidikan Islam akan membangkitkan sayap radikal Islam"*.

Di jurnal ini juga, Rektor UIN Yogyakarta, Prof. Dr. Amin Abdullah (2001) menulis, *"Pendidikan agama semata-mata menekankan keselamatan individu dan kelompoknya sendiri menjadikan anak didik kurang begitu sensitif atau kurang begitu peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh sesama, yang kebetulan memeluk agama lain. Hal demikian bisa saja terjadi oleh karena adanya keyakinan yang tertanam kuat bahwa orang atau kelompok yang tidak seiman atau tidak seagama adalah "lawan" secara aqidah"*.

E. Penutup

Proses liberalisasi yang terus-menerus masuk melalui perguruan tinggi Islam tidak hanya berimbas pada satu mata kuliah atau jurusan saja. Lebih daripada itu, imbasnya juga dirasakan oleh semua peserta didik dari semua fakultas termasuk fakultas hukum. Ketika mahasiswa fakultas hukum mendapatkan doktrin pengajaran agama, maka ia akan terpengaruh oleh doktrin tersebut. Tentu, kurikulum yang dibangun juga ikut berpengaruh. Bagaimana jika yang banyak diajarkan melalui pendidikan Islam adalah paham liberal dan sekuler? Apatah lagi pemahaman tersebut tidak hanya ada di buku, namun juga ada dalam pikiran para dosen? Di sinilah keprihatinan bermula.

Sudah bukan rahasia lagi apabila konstruksi pemikiran lulusan perguruan tinggi Islam dimulai sejak ia duduk di bangku kuliah. Pergumulan mereka dengan buku, lingkungan kampus, dosen yang mengajar dan segala aktivitas yang di *design* akan membentuk pola pikir dan cara pandang mereka. Apalagi jika aktivitas itu dibuat agar mahasiswa menjauhi nilai-nilai agama dan berpindah pada nilai-nilai kebebasan, relativisme dan sekulerisme yang dianggap universal dan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 2001. *Pengajaran Kalam dan Teknologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama*. Jurnal *Tashwirul Afkar*, edisi no. 11.
- Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib (ed). 1979. *Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education. In Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: Hodder and Stoughton.
- Al Abrasyi, M. Athiyah. 1979. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (terj). Jakarta: Bulan Bintang.
- Cox, Harvey. 1967. *The Secular: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. New York: The Macmillan Company.
- Dewey, John. 1958. *Philosophy of Education*. Littlefield Adams & Co., Ames.
- Daradjad, Zakiyah. 1994. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama.
- Husaini, Adian. "Liberalisasi Pendidikan Tinggi", dalam <http://www.insistnet.com>
- Langgulung, Hasan. 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi abad ke 21*. Jakarta: Al Husna.
- Marimba, Ahmad D. 1974. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Nasution, Harun. 1986. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid 1 Cet kde-6)). Jakarta: UI Press.
- Rasjidi, 1977. *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang 'Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya'*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Roqib, Moh. Tt. *Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta, LKis.
- Teehanke, Julio. "Equity and Justice in a Globalization World: A Liberal Review", dalam <http://www.fnf.org.ph/seminars/reports/equity-justice-in-globalized-world-review.htm>

Zada, Khamami. 2001. *Membebaskan Pendidikan Islam: Dari Eksklusivisme Menuju Inklusivisme dan Pluralisme*, Jurnal *Tashwirul Afkar*, edisi no. 11.